



**QANUN KOTA BANDA ACEH**  
**NOMOR 2 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**KOTA BANDA ACEH**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**  
**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**  
**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**  
**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBK Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan Qanun Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

*Nomor.....*

- Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

*Pimpinan.....*

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

*21. Peraturan.....*

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

*Menteri .....*

- Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
  30. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3)
  31. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Seri A Nomor 4);

*Dengan .....*

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH**

Dan

**WALIKOTA BANDA ACEH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2013.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 893.834.094.394,- bertambah sejumlah Rp. 92.141.591.025,- sehingga menjadi Rp. 985.975.685.419,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 892.785.194.394,-
b. Bertambah	<u>Rp. 56.134.708.722,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 948.919.903.116,-
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 893.834.094.394,-
b. Bertambah	<u>Rp. 92.141.591.025,-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 985.975.685.419,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (37.055.782.303),-
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 4.548.900.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 36.006.882.303,-</u>

*Jumlah .....*

Jumlah Penerimaan  
setelah Perubahan Rp. 40.555.782.303,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 3.500.000.000,-

2) Berkurang Rp. 3.500.000.000,-

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp. 0,-

Jumlah Pembiayaan Netto

setelah Perubahan Rp. 37.055.782.303,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

setelah perubahan Rp 0,-

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 101.400.000.000,-

2) Bertambah Rp. 6.377.767.158,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah .....

setelah Perubahan Rp. 107.777.767.158,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 637.832.338.000,-

2) Berkurang Rp. 0,-

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan Rp. 637.832.338.000,-

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 153.552.856.394,-

2) Bertambah Rp. 49.756.941.564,-

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

setelah Perubahan Rp. 203.309.797.958,-

(2) Pendapatan .....



(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 38.460.000.000,-

2) Berkurang Rp. (2.000.000.000),-

Jumlah Pajak Daerah

setelah Perubahan Rp. 36.460.000.000,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 17.515.775.000,-

2) Bertambah Rp. \_\_\_\_\_ 0,-

Jumlah Retribusi Daerah

setelah Perubahan Rp. 17.515.775.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan

1) Semula Rp. 400.000.000,-

2) Bertambah Rp. 338.714.350,-

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

setelah Perubahan Rp. 738.714.350,-

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp. 31.288.002.453,-

2) Bertambah Rp. 7.537.552.808,-

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 38.825.555.261,-

e. Zakat

1) Semula Rp. 13.736.222.547,-

2) Bertambah Rp. 501.500.000,-

Zakat setelah

Perubahan Rp. 14.237.722.547,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp. 39.200.400.000,-

2) Bertambah Rp. \_\_\_\_\_ 0,-

Jumlah.....

Jumlah Dana Bagi Hasil

setelah Perubahan Rp. 39.200.400.000,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 567.628.828.000,-

2) Berkurang Rp. 0,-

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah

Perubahan Rp. 567.628.828.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 31.003.110.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah

Perubahan Rp. 31.003.110.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula Rp. 5.000.000.000,-

2) Bertambah Rp. 4.500.000.000,-

Jumlah Pendapatan Hibah

setelah Perubahan Rp. 9.500.000.000,-

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Dana Darurat

setelah Perubahan Rp. 0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp. 15.302.800.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak

setelah Perubahan Rp. 15.302.800.000,-

d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 72.955.048.000,-

2) Berkurang Rp. 29.886.861.564,-

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

*Jumlah.....*

setelah Perubahan Rp. 102.841.909.564,-

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 15.000.000.000,-

Jumlah Pendapatan Yang Sah Lainnya

setelah Perubahan Rp. 15.000.000.000,-

f. Pendapatan Yang Sah Lainnya

1) Semula Rp. 60.295.008.394,-

2) Bertambah Rp. 370.080.000,-

Jumlah Pendapatan Yang Sah Lainnya

setelah Perubahan Rp. 60.665.088.394,-

**Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 527.506.740.844,-

2) Bertambah Rp. 40.989.183.193,-

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah Perubahan Rp. 568.495.924.036,-

b. Belanja Langsung sejumlah

1) Semula Rp. 366.327.353.550,-

2) Bertambah Rp. 51.152.407.833,-

Jumlah Belanja Langsung

setelah Perubahan Rp. 417.479.761.383,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 501.174.646.683,-

2) Bertambah Rp. 40.015.897.333,-

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp. 542.190.544.015,-

*b. Belanja....*

b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp.	4.000.000.000,-	
2) Berkurang	Rp.	<u>859.214.140,-</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.		3.140.785.860,-
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp.		0,-
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.		0,-
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	7.514.880.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>695.000.000,-</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.		8.209.880.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	865.689.061,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.		865.689.061,-
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	13.461.525.100,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>137.500.000,-</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.		13.599.025.100,-
g. Belanja Tidak Terduga sejumlah			
1) Semula	Rp.	490.000.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.		490.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	83.299.389.398,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>2.477.722.641,-</u>	

*Jumlah .....*

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp. 85.777.112.039,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 175.536.698.367,-

2) Bertambah Rp. 21.320.205.535,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah Perubahan Rp. 196.856.903.902,-

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 107.491.265.785,-

2) Bertambah Rp. 27.354.479.657,-

Jumlah Belanja Modal

setelah Perubahan Rp 134.845.745.442,-

**Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 4.548.900.000,-

2) Bertambah Rp. 40.555.782.303,-

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp. 36.006.882.303,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 3.500.000.000,-

2) Berkurang Rp. 0,-

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp. 3.500.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula Rp. 4.548.900.000,-

2) Bertambah Rp. 40.555.782.303,-

*Jumlah .....*

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya  
setelah Perubahan Rp. 36.006.882.303,-

b. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula Rp. 0,-

2) Berkurang Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah

setelah Perubahan Rp. 0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah  
Daerah

1) Semula Rp. 3.500.000.000,-

2) Berkurang Rp. 3.500.000.000,-

Jumlah Penyertaan Modal (investasi)

setelah Perubahan Rp. 0,-

b. Pembayaran Pokok Hutang

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Pembayaran Pokok Hutang

setelah Perubahan Rp. 0,-

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum  
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari Qanun ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut  
Urusan Pemerintahan Daerah dan  
Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut  
Urusan Pemerintahan Daerah,

*Organisasi .....*

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

#### **Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai landasan operasional pelaksanaan

#### **Pasal 7**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*Agar .....*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 18 Oktober 2013 M  
13 Zulhijjah 1434 H

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**MAWARDY NURDIN**

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 18 Oktober 2013 M  
13 Zulhijjah 1434 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**T. SAIFUDDIN T.A**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI  
A NOMOR 2